

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum, sekaligus sebuah profesi, posisinya sangat penting dalam membantu dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris harus mencegah terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat pembuktian yang sempurna di pengadilan. Notaris merupakan profesi yang terhormat selalu lekat dengan etika dan dengan etikalah Notaris berhubungan dengan pekerjaannya. Tanpa etika, Notaris hanyalah robot-robot mekanis yang bergerak dalam tanpa jiwa. Karena lekatnya etika pada profesi Notaris disebut sebagai profesi mulia (*officium nobile*).¹ Kewenangan Notaris, berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberi groose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan.

Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penetapan tariff honorarium Notaris di Kabupaten Cirebon. Untuk memahami dan menganalisis peranan majelis pengawasan daerah (MPD) dalam mengatur dan mengawasi tarif /honorarium Notaris agar tidak terjadi persaingan antar notaris. Untuk menjelaskan akibat bagi masyarakat dan Notaris jika tarif/Honorarium Notaris di Kabupaten Cirebon ada perbedaan yang signifikan

Metode yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu lebih memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisa yang bersifat empiris dengan melihat pada penerapan peraturan perundang-undang yang berlaku permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis sosiologis dan kenyataan yang ada mengenai penerapan peranan majelis pengawas daerah (MPD) dalam melakukan pengawasan tarif jasa/ honorarium notaris di Kabupaten Cirebon hukum yuridis sosiologis atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data. Pelaksanaan Penetapan Tarif/Honorarium Notaris di Kabupaten Cirebon sampai saat ini terlaksana dengan cukup baik walaupun belum bisa dikatakan bagus karena beberapa Notaris masih melakukan tindakan yang tidak sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris masalah Honorarium yang menarifkan tarif dibawah ketentuan yang berlaku atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dikarenakan beberapa Notaris.

Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Mengawasi tariff jasa/Honorarium Notaris agar tidak menjadi persaingan harga dengan cara Majelis Pengawas Daerah melakukan pengawasan terhadap Notaris-Notaris di kabupaten Cirebon mengenai tariff jasa yang di berikan kepada klien yang membutuhkan jasa dari notaris tersebut.

Akibat bagi masyarakat dan Notaris jika tariff Honorarium Notaris di Kabupaten Cirebon ada perbedaan yang signifikan yang pertama bagi masyarakat Kabupaten Cirebon permasalahan Honorarium Notaris apabila ada perbedaan itu bisa aja menguntungkan masyarakat karena tidak semua masyarakat mampu untuk membayar jasa Notaris dan masyarakat juga tidak tahu ketentuan mengenai tariff jasa Notaris

Kata Kunci : Peranan, Majelis Pengawas dan, Tarif/Honorarium

ABSTRACT

Notary as a general official, as well as a profession, his position is very important in helping in providing legal certainty for the community. The Notary must prevent the occurrence of legal problems in the future through an authentic deed which he made as a perfect evidentiary tool in court. Notary is a respectable profession that is always attached to ethics and with ethics the Notary is related to his work. Without ethics, Notaries are only mechanical robots that move in without a soul. Because the stickiness of ethics in the Notary profession is called a noble profession (*officium nobile*).¹ Authority of Notaries, based on Article 15 of the Notary Position Act (UUJN) is to make authentic deeds regarding deeds, promises and provisions required by laws and / or desired by the interested party to be stated in an authentic deed, guaranteeing the certainty of the date of creation of the deed, storing the deed, giving goose, copy and quote of the deed, all of that as long as the deeds are not also assigned or excluded.

To find out and analyze the implementation of Notary honorarium tariff determination in Cirebon Regency. To understand and analyze the role of regional supervisory assemblies (MPD) in regulating and supervising Notary tariffs / honoraria so that there is no competition between notaries

The method used by the writer in this research is a juridical sociological research method. The sociological juridical approach is giving more importance to the steps of empirical observation and analysis by looking at the application of laws and regulations that apply the issues concerning sociological juridical matters and the existing facts regarding the application of the role of regional supervisory assemblies (MPD) in supervising the rates of notary services / honoraria in Cirebon Regency sociological juridical law or sociological research namely legal research that uses data. Notary Tariffs / Honorarium Implementation in Cirebon District until now has been carried out quite well, although it cannot be said to be good because some Notaries are still taking actions that are not in accordance with the Law of Notary Position Honorarium issues that charge tariffs under the applicable provisions or not in accordance with the Law -The Notary Position is due to several Notaries.

The Role of the Regional Supervisory Board In supervising the service fee / Notary Honorarium so as not to become price competition by means of the Regional Supervisory Board to supervise Notary-Notaries in Cirebon district regarding the service fees provided to clients who need the services of the notary. As a result for the community and Notary if the Notary Honorarium tariff in Cirebon Regency is the first significant difference for the people of Cirebon Regency, the issue of Notary Honorarium if there is a difference, it can only benefit the community because not all people are able to pay for Notary services and the public also does not know the provisions regarding tariffs Notary services

Keywords: Role, Supervisory Board and, Honorarium